

**Visual Framing dan Populisme Komunikatif dalam
Komunikasi Risiko: Studi Kasus Pembongkaran Hibisc
Fantasy oleh Dedi Mulyadi**

*Visual Framing and Communicative Populism in Risk
Communication: A Case Study of the Hibisc Fantasy Demolition
by Dedi Mulyadi*

Endika Fitra Wijaya¹

Aminah Swarnawati²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jakarta

Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat, Tangerang Selatan,
Banten 15419

endikawi@gmail.com

Dikirim: 7 Mei 2026, Direvisi: 20 Juni 2026, Diterima: 21 Juni
2026, Terbit: 28 Juni 2026. Sitasi: Wijaya, E. F., Swarnawati, A.
(2026). Visual Framing dan Populisme Komunikatif dalam
Komunikasi Risiko: Studi Kasus Pembongkaran Hibisc Fantasy
oleh Dedi Mulyadi. *Promedia: Public Relation dan Media
Komunikasi*, 12(1), 220-238

Abstract

Conflicts over spatial planning and violations of conservation areas have become significant issues in environmental governance in Indonesia, leading to public distrust toward formal institutions. This study examines how visual framing and communicative populism were utilized in the risk communication practices of West Java Governor Dedi Mulyadi during the demolition of the illegal tourist area Hibisc Fantasy in Puncak, West Java. The research employed a qualitative descriptive-interpretative approach using data collected from Dedi Mulyadi's social media content, online news coverage, and spatial planning policy documents. Data analysis was conducted through thematic content analysis by integrating framing theory, outrage management, visual framing, communicative populism, and the Social Amplification of Risk Framework (SARF). The findings reveal that Dedi Mulyadi's risk communication was not merely informative, but also constructed

moral legitimacy through emotional narratives, visual representations of environmental damage, and a populist communicative style. Visual framing strengthened public perception of environmental risks and amplified social responses in digital spaces. This study contributes to the development of risk communication studies in Indonesia by highlighting the role of public figures in shaping public risk perception through digital media. The findings also demonstrate that social media functions not only as a channel for information dissemination, but also as a space for constructing moral narratives and public legitimacy regarding environmental issues..

Keywords: risk communication, visual framing, communicative populism, social media, SARF

Abstraksi

Konflik tata ruang dan pelanggaran kawasan konservasi menjadi persoalan penting dalam tata kelola lingkungan di Indonesia yang memicu ketidakpercayaan publik terhadap institusi formal. Penelitian ini membahas bagaimana visual framing dan populisme komunikatif digunakan dalam komunikasi risiko yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, pada kasus pembongkaran kawasan wisata ilegal Hibisc Fantasy di Puncak, Jawa Barat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-interpretatif dengan sumber data berupa unggahan media sosial Dedi Mulyadi, pemberitaan media daring, dan dokumen kebijakan tata ruang. Analisis data dilakukan melalui analisis isi tematik dengan mengintegrasikan teori framing, outrage management, visual framing, populisme komunikatif, dan Social Amplification of Risk Framework (SARF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko yang dilakukan Dedi Mulyadi tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga membangun legitimasi moral melalui narasi emosional, visualisasi kerusakan lingkungan, dan gaya komunikasi populistik. Visual framing terbukti memperkuat persepsi risiko publik dan menghasilkan amplifikasi respons sosial di ruang digital. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam

pengembangan studi komunikasi risiko di Indonesia dengan memperlihatkan peran figur publik dalam membentuk persepsi risiko melalui media digital. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai ruang konstruksi narasi moral dan legitimasi publik terhadap isu lingkungan.

Kata Kunci: komunikasi risiko, visual framing, populisme komunikatif, media sosial, SARF

I. PENDAHULUAN

Konflik tata ruang dan pelanggaran kawasan konservasi menjadi salah satu persoalan serius dalam tata kelola lingkungan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah memiliki berbagai regulasi seperti Undang-Undang Penataan Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, terutama ketika kepentingan ekonomi dan politik saling beririsan (Firman, 2009; Anwar & Prasetyo, 2021). Situasi ini tidak hanya memunculkan kerusakan ekologis, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap institusi formal dalam mengelola risiko lingkungan secara transparan dan adil. Dalam kondisi demikian, figur publik sering kali mengambil peran sebagai komunikator utama untuk menjembatani ketegangan antara kebijakan pemerintah dan persepsi masyarakat.

Dalam konteks komunikasi publik, risiko tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan teknis yang disampaikan melalui data dan informasi ilmiah. Komunikasi risiko berkembang menjadi proses sosial yang melibatkan pembentukan persepsi, emosi, dan respons masyarakat terhadap suatu ancaman (Covello & Sandman, 2001). Respons publik terhadap risiko sering kali dipengaruhi oleh faktor emosional seperti rasa marah, ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap lembaga formal. Sandman (1993) menjelaskan fenomena tersebut melalui konsep *outrage management*, yaitu kondisi ketika persepsi risiko publik lebih dipengaruhi oleh kemarahan sosial dibandingkan besarnya

ancaman objektif. Dalam konteks komunikasi digital, emosi publik menjadi semakin penting karena media sosial memungkinkan penyebaran narasi yang cepat, personal, dan viral.

Perkembangan media digital juga mengubah cara risiko dikonstruksi dan dipersepsikan oleh masyarakat. Komunikasi visual kini memainkan peran penting dalam membangun opini publik, terutama melalui media sosial yang mengutamakan konten audiovisual. Messaris dan Abraham (2001) menjelaskan bahwa gambar, ekspresi wajah, simbol visual, dan komposisi audiovisual memiliki kekuatan framing yang mampu membentuk interpretasi sosial dan moral secara lebih cepat dibandingkan teks. Powell et al. (2015) bahkan menemukan bahwa visual memiliki efek framing yang lebih kuat terhadap sikap dan niat bertindak publik dibandingkan narasi verbal semata. Dalam ekosistem media digital, visual framing menjadi instrumen penting dalam membangun resonansi emosional dan memperkuat persepsi risiko di tengah masyarakat.

Di Indonesia, penelitian komunikasi risiko sebagian besar masih berfokus pada komunikasi kebencanaan dan kesehatan publik dengan pendekatan yang cenderung birokratis dan institusional. Studi mengenai komunikasi risiko banjir (Lahi & Suldani, 2025), longsor (Rohman & Puspitasari, 2021), maupun pandemi COVID-19 (Surbakti & Laksana, 2021; Winugroho et al., 2022) umumnya menempatkan institusi pemerintah sebagai aktor utama dalam penyampaian pesan risiko. Sementara itu, penelitian yang mengkaji komunikasi risiko berbasis figur publik, khususnya kepala daerah yang memanfaatkan media sosial secara personal dan populistik, masih relatif terbatas. Padahal, perkembangan media digital menunjukkan bahwa figur publik memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi publik terhadap isu sosial dan lingkungan.

Fenomena tersebut terlihat dalam kasus pembongkaran kawasan wisata Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Jawa Barat. Kasus ini memperoleh perhatian publik karena adanya dugaan pelanggaran tata ruang dan perluasan pembangunan yang melampaui cakupan perizinan yang dimiliki, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kepatuhan terhadap regulasi

lingkungan dan tata ruang. Kasus ini memperoleh perhatian publik luas setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara aktif mengomunikasikan proses pembongkaran melalui media sosial pribadi, terutama Instagram dan YouTube. Alih-alih menggunakan pendekatan birokratis formal, Dedi Mulyadi membangun komunikasi risiko melalui narasi emosional, visualisasi kerusakan lingkungan, serta gaya komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Ia menampilkan dirinya sebagai figur yang berpihak pada rakyat dan lingkungan, sekaligus membingkai pelanggaran tata ruang sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekologis. Pendekatan komunikasi semacam ini menunjukkan karakteristik populisme komunikatif sebagaimana dijelaskan oleh Moffitt (2016), yaitu gaya komunikasi politik yang menekankan kedekatan emosional dengan publik, penggunaan simbol konflik moral, dan personalisasi kepemimpinan.

Kasus Hibisc Fantasy dipilih secara purposif sebagai sebuah revelatory case dalam penelitian komunikasi risiko digital. Kasus ini memberikan peluang untuk mengamati secara langsung bagaimana seorang kepala daerah menggunakan media sosial personal sebagai instrumen komunikasi risiko dalam isu lingkungan yang sedang menjadi perhatian publik. Selain memperoleh eksposur media yang tinggi, kasus ini juga memperlihatkan kombinasi yang relatif jarang ditemukan antara visualisasi risiko lingkungan, personalisasi kepemimpinan, dan penggunaan narasi populistik dalam proses penegakan kebijakan. Dengan karakteristik tersebut, kasus Hibisc Fantasy dinilai relevan untuk mengeksplorasi hubungan antara visual framing, populisme komunikatif, dan komunikasi risiko yang selama ini masih terbatas dikaji dalam konteks Indonesia.

Dalam konteks media digital, komunikasi risiko yang dilakukan Dedi Mulyadi juga berpotensi menghasilkan amplifikasi risiko sosial. Social Amplification of Risk Framework (SARF) menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan memperbesar atau memperkecil persepsi publik terhadap suatu risiko melalui narasi, simbol, dan representasi visual yang beredar secara luas (Yusuf et al., 2024). Konten visual mengenai pembongkaran Hibisc Fantasy yang tersebar di media sosial tidak hanya

menyampaikan informasi mengenai pelanggaran tata ruang, tetapi juga membangun persepsi moral bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk perjuangan melawan ketidakadilan lingkungan. Akibatnya, isu yang semula bersifat administratif berkembang menjadi perdebatan publik yang melibatkan emosi, legitimasi moral, dan dukungan sosial.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji hubungan antara visual framing, populisme komunikatif, dan komunikasi risiko dalam konteks penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sebagian besar penelitian komunikasi risiko masih menempatkan media sosial sebagai saluran distribusi informasi, bukan sebagai arena konstruksi makna sosial dan emosional. Selain itu, penelitian mengenai kepala daerah sebagai aktor komunikasi risiko digital juga masih terbatas, terutama yang mengkaji bagaimana figur publik menggunakan visualisasi risiko dan pendekatan populistik untuk membangun legitimasi kebijakan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana visual framing dan populisme komunikatif digunakan dalam komunikasi risiko oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kasus pembongkaran Hibisc Fantasy. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi narasi verbal, penggunaan elemen visual, serta pembentukan amplifikasi risiko sosial dalam komunikasi digital yang dilakukan Dedi Mulyadi. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan kontribusi melalui integrasi konsep framing (Entman, 1993), outrage management (Sandman, 1993), visual framing (Messaris & Abraham, 2001), populisme komunikatif (Moffitt, 2016), dan Social Amplification of Risk Framework (SARF). Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian komunikasi risiko digital di Indonesia, khususnya terkait peran figur publik dalam membangun persepsi risiko lingkungan melalui media sosial.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif untuk menganalisis komunikasi

risiko yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kasus pembongkaran kawasan wisata ilegal Hibisc Fantasy di kawasan Puncak, Jawa Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemaknaan narasi, simbol, visual, dan konstruksi komunikasi yang dibangun melalui media sosial, sehingga memerlukan interpretasi mendalam terhadap konteks sosial dan representasi pesan (Creswell, 2018). Penelitian ini memusatkan perhatian pada bagaimana komunikasi risiko dibentuk melalui kombinasi framing verbal, visual framing, dan gaya populisme komunikatif dalam ruang digital.

Data utama penelitian diperoleh melalui dokumentasi unggahan media sosial resmi Dedi Mulyadi, terutama pada platform Instagram dan YouTube, yang berkaitan dengan proses pembongkaran Hibisc Fantasy. Data yang dianalisis terdiri atas 12 unggahan Instagram dan 8 video YouTube yang dipublikasikan selama periode Maret–April 2025, yaitu sejak proses pembongkaran mulai mendapat perhatian publik hingga tahap pascapembongkaran. Pemilihan data dilakukan secara purposif dengan kriteria: (1) memuat narasi mengenai pelanggaran tata ruang atau risiko lingkungan, (2) menampilkan visualisasi proses pembongkaran atau kondisi lingkungan, dan (3) mengandung pernyataan langsung Dedi Mulyadi terkait tindakan kebijakan yang dilakukan.

Data yang dikumpulkan meliputi video, caption, potongan pernyataan verbal, dan elemen visual yang ditampilkan dalam unggahan. Informasi mengenai jumlah tayangan, komentar, dan respons audiens digunakan sebagai data kontekstual untuk melihat tingkat jangkauan dan perhatian publik terhadap isu yang dikomunikasikan, namun tidak dianalisis sebagai unit data utama dalam penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa pemberitaan media daring, dokumen kebijakan tata ruang, dan berbagai literatur akademik yang relevan dengan komunikasi risiko, visual framing, populisme komunikatif, dan komunikasi media digital. Dokumen kebijakan yang digunakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai konteks regulasi dalam kasus pelanggaran tata ruang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi digital dan studi kepustakaan. Peneliti melakukan seleksi terhadap unggahan media sosial yang secara langsung menampilkan narasi komunikasi risiko, visualisasi kerusakan lingkungan, serta representasi emosional yang berkaitan dengan proses pembongkaran kawasan wisata Hibisc Fantasy. Selanjutnya, data dikategorikan berdasarkan tema komunikasi, bentuk visual, dan konteks penyampaian pesan untuk memudahkan proses interpretasi dan analisis tematik.

Analisis data dilakukan menggunakan thematic content analysis dengan tahapan reduksi data, proses coding, kategorisasi tema, dan interpretasi makna. Pada tahap awal, peneliti melakukan open coding terhadap unsur verbal dan visual yang muncul dalam setiap unggahan. Kode-kode awal kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tematik yang mengacu pada kerangka teori penelitian, yaitu: (1) definisi masalah risiko, (2) atribusi penyebab, (3) evaluasi moral, (4) rekomendasi penyelesaian, (5) representasi visual risiko lingkungan, (6) ekspresi emosional, dan (7) indikator populisme komunikatif. Seluruh proses coding dilakukan oleh peneliti secara bertahap melalui pembacaan berulang terhadap data untuk memastikan konsistensi interpretasi.

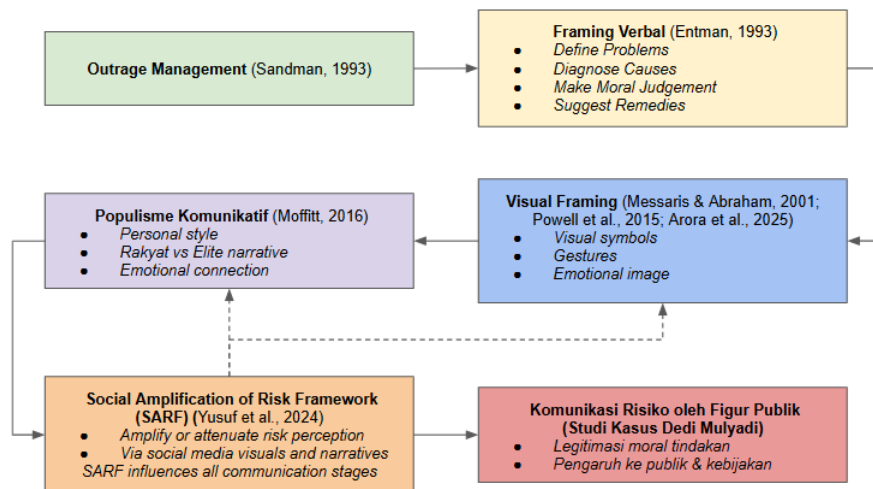
Teori framing dari Entman (1993) digunakan untuk menganalisis bagaimana Dedi Mulyadi mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi dalam komunikasi publiknya. Penelitian ini juga menggunakan konsep outrage management dari Sandman (1993) untuk memahami bagaimana emosi publik seperti kemarahan, ketidakpercayaan, dan rasa ketidakadilan dikelola melalui komunikasi digital. Selain itu, pendekatan visual framing dari Messaris dan Abraham (2001) digunakan untuk membaca bagaimana elemen visual seperti gambar, ekspresi wajah, simbol, sudut pengambilan gambar, dan komposisi audiovisual digunakan untuk membangun makna sosial dan emosional. Analisis visual dilakukan secara multimodal dengan memperhatikan hubungan antara unsur visual dan narasi verbal dalam membentuk konstruksi risiko. Analisis visual juga merujuk pada Powell et al. (2015) dan Arora et al. (2025), yang menekankan bahwa visual memiliki

kemampuan memperkuat framing risiko dan memengaruhi respons publik secara lebih efektif dibandingkan teks semata

Untuk memahami konteks komunikasi politik digital, penelitian ini turut menggunakan perspektif populisme komunikatif dari Moffitt (2016) untuk menjelaskan gaya komunikasi Dedi Mulyadi yang bersifat personal, emosional, dan dekat dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menggunakan Social Amplification of Risk Framework (SARF) untuk melihat bagaimana media sosial memperbesar persepsi risiko publik melalui distribusi visual, narasi emosional, dan interaksi digital (Yusuf et al., 2024). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data dari unggahan media sosial, pemberitaan media daring, dan dokumen kebijakan yang relevan, serta melakukan pembacaan berulang terhadap data visual dan verbal untuk memastikan konsistensi interpretasi.

Kerangka konseptual penelitian ini divisualisasikan dalam Gambar 1 yang menunjukkan keterkaitan antara framing, visual framing, populisme komunikatif, dan Social Amplification of Risk Framework (SARF) dalam analisis komunikasi risiko Dedi Mulyadi pada kasus pembongkaran Hibisc Fantasy.

Gambar 1. Kerangka Pikir Analisis Komunikasi Risiko Dedi Mulyadi dalam Kasus Pembongkaran Hibisc Fantasy Dedi Mulyadi dalam Kasus Hibisc Fantasy



Kerangka konseptual penelitian ini divisualisasikan dalam Gambar 1 yang menunjukkan keterkaitan antara framing, visual framing, populisme komunikatif, dan Social Amplification of Risk Framework (SARF) dalam analisis komunikasi risiko Dedi Mulyadi pada kasus pembongkaran Hibisc Fantasy

III. PEMBAHASAN

Framing Moral dalam Komunikasi Risiko

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam kasus pembongkaran kawasan wisata ilegal Hibisc Fantasy tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi mengenai pelanggaran tata ruang, tetapi juga sebagai upaya membangun legitimasi moral dan dukungan publik terhadap tindakan penegakan hukum lingkungan. Komunikasi yang dibangun Dedi Mulyadi memperlihatkan pergeseran dari pola komunikasi birokratis yang formal menuju pendekatan yang lebih personal, emosional, dan berbasis media sosial.

Dalam berbagai unggahan media sosialnya, Dedi Mulyadi secara konsisten menggunakan framing moral untuk mendefinisikan persoalan Hibisc Fantasy sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan ekologis. Pernyataan seperti “*Ini tanah negara, bukan untuk dijual!*” menunjukkan bahwa persoalan tata ruang tidak dibingkai sekadar sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai tindakan yang merugikan kepentingan publik dan lingkungan. Pendekatan tersebut sesuai dengan konsep framing dari Entman (1993), yang menjelaskan bahwa framing dilakukan melalui proses mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, dan menawarkan solusi.

Melalui framing tersebut, Dedi Mulyadi memosisikan dirinya sebagai figur yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan, sementara pihak pelanggar tata ruang digambarkan sebagai kelompok elite yang mengabaikan kepentingan publik. Framing moral semacam ini memperkuat legitimasi tindakan pembongkaran dan membantu membangun dukungan sosial di media digital.

Tabel 1. Analisis Elemen Framing Pesan Komunikasi Risiko Dedi Mulyadi berdasarkan Entman (1993)

No	Elemen Framing	Temuan pada Dedi Mulyadi
1.	<i>Define Problems</i>	Menyatakan tanah negara dirampas oleh pembangunan ilegal
2.	<i>Diagnose Causes</i>	Menyalahkan elite ekonomi sebagai pihak yang melanggar hukum.
3.	<i>Make Moral Judgement</i>	Membingkai kasus sebagai bentuk ketidakadilan ekologis dan sosial

4.	<i>Suggest Remedies</i>	Mengajak tindakan pembongkaran sebagai langkah penegakan hukum dan moral.
----	-------------------------	---

Sumber : data diolah peneliti (2026).

Selain itu, pendekatan komunikasi yang dilakukan Dedi Mulyadi juga menunjukkan karakteristik outrage management sebagaimana dijelaskan Sandman (1993). Komunikasi risiko tidak hanya berorientasi pada penyampaian fakta, tetapi juga mengelola emosi publik seperti kemarahan, rasa ketidakadilan, dan ketidakpercayaan terhadap institusi formal. Dalam konteks ini, Dedi Mulyadi menggunakan komunikasi emosional untuk memperkuat persepsi publik bahwa tindakan pembongkaran merupakan bentuk keberpihakan terhadap masyarakat dan lingkungan.

Visual Framing dan Amplifikasi Risiko Sosial

Penelitian ini menemukan bahwa kekuatan komunikasi risiko Dedi Mulyadi tidak hanya terletak pada narasi verbal, tetapi juga pada penggunaan visual framing dalam media sosial. Konten video yang menampilkan reruntuhan bangunan ilegal, kerusakan lingkungan, alat berat pembongkaran, hingga ekspresi emosional warga dan Dedi Mulyadi sendiri menjadi elemen penting dalam membangun persepsi risiko publik.

Messariss dan Abraham (2001) menjelaskan bahwa visual memiliki kemampuan retorik yang kuat karena mampu menyampaikan pesan moral dan emosional secara cepat serta mudah dipahami publik. Dalam kasus Hibisc Fantasy, visualisasi kerusakan lingkungan digunakan untuk memperkuat narasi bahwa pelanggaran tata ruang merupakan ancaman nyata terhadap lingkungan dan kepentingan masyarakat. Powell et al. (2015) juga menyebutkan bahwa visual framing memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap sikap dan respons publik dibandingkan narasi teks semata.

Visual framing yang digunakan Dedi Mulyadi terlihat melalui penggunaan sudut pengambilan gambar, close-up ekspresi wajah, simbol kerusakan lingkungan, serta teks visual yang menegaskan

pesan moral. Strategi visual tersebut membangun resonansi emosional yang memperkuat dukungan publik terhadap tindakan pembongkaran.

Tabel 2. Elemen Visual Framing dalam Unggahan Media Sosial
Dedi Mulyadi

No	Elemen Visual	Makna yang Disampaikan
1.	Video reruntuhan bangunan	Memperlihatkan kerusakan ekologis secara nyata.
2.	Close-up ekspresi Dedi marah dan sedih	Menegaskan keseriusan moral dan keberpihakan pada rakyat.
3.	Teks “Ini tanah negara!” di video	Membangkitkan isu sebagai persoalan moral dan keadilan publik.
4.	Warga mendukung pembongkaran	Membangun legitimasi sosial terhadap tindakan yang diambil.

Sumber : data diolah peneliti (2026).

Dalam perspektif Social Amplification of Risk Framework (SARF), visual dan narasi emosional yang tersebar melalui media sosial berperan dalam memperbesar persepsi risiko publik terhadap isu tata ruang dan kerusakan lingkungan. Unggahan video pembongkaran Hibisc Fantasy memperoleh jutaan tayangan dan ribuan komentar di media sosial, yang menunjukkan terjadinya amplifikasi risiko sosial melalui distribusi visual digital.

Efek amplifikasi tersebut membuat isu yang awalnya bersifat administratif berkembang menjadi persoalan moral yang melibatkan emosi publik, dukungan sosial, serta tekanan terhadap pelaku pelanggaran tata ruang. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, tetapi juga sebagai arena konstruksi makna sosial dan legitimasi kebijakan.

Populisme Komunikatif dan Legitimasi Publik

Komunikasi risiko yang dilakukan Dedi Mulyadi juga memperlihatkan karakteristik populisme komunikatif sebagaimana dijelaskan oleh Moffitt (2016). Gaya komunikasi yang digunakan bersifat personal, sederhana, emosional, dan menampilkan kedekatan simbolik dengan masyarakat. Dalam berbagai unggahannya, Dedi Mulyadi tidak tampil sebagai birokrat formal, melainkan sebagai figur yang hadir langsung di lapangan dan berbicara menggunakan bahasa yang mudah dipahami publik.

Pendekatan tersebut membangun citra bahwa Dedi Mulyadi merupakan representasi kepentingan rakyat dalam menghadapi elite ekonomi yang dianggap merusak lingkungan dan melanggar aturan tata ruang. Narasi konflik moral antara rakyat dan elite menjadi salah satu elemen penting dalam populisme komunikatif yang digunakan dalam komunikasi risiko kasus Hibisc Fantasy.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan populisme komunikatif mampu meningkatkan kedekatan emosional dan kepercayaan publik terhadap figur pemimpin. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Schiavo (2025) dan Peter et al. (2024), yang menjelaskan bahwa komunikasi risiko berbasis nilai dan emosi memiliki efektivitas tinggi dalam membangun keterlibatan publik, terutama di tengah rendahnya kepercayaan terhadap institusi formal.

Selain itu, penggunaan media sosial secara personal memungkinkan Dedi Mulyadi membangun komunikasi yang lebih langsung dan interaktif dengan masyarakat. Interaksi melalui komentar, video, dan respons publik menciptakan kesan keterlibatan sosial yang kuat dan memperkuat legitimasi tindakan pembongkaran di mata publik.

Risiko Personalisasi Kebijakan dalam Komunikasi Risiko

Meskipun pendekatan populisme komunikatif terbukti efektif dalam membangun dukungan publik, penelitian ini juga menemukan adanya risiko personalisasi kebijakan dalam komunikasi risiko. Beberapa pihak menilai bahwa komunikasi yang terlalu berpusat pada figur pemimpin berpotensi

mengaburkan peran institusi formal dan prosedur birokrasi dalam penegakan hukum lingkungan.

Pranoto (2020) menjelaskan bahwa populisme komunikasi dapat menciptakan dominasi figur individu dalam ruang publik, sehingga kebijakan lebih dipersepsikan sebagai tindakan personal dibandingkan kerja institusional. Dalam konteks kasus Hibisc Fantasy, dominasi figur Dedi Mulyadi dalam komunikasi publik berpotensi menimbulkan persepsi bahwa keberhasilan penegakan hukum bergantung pada figur tertentu, bukan pada sistem tata kelola yang kuat.

Temuan ini berbeda dengan penelitian Rohman dan Puspitasari (2021), yang menekankan pentingnya komunikasi risiko berbasis institusi dalam membangun stabilitas dan konsistensi kebijakan. Dalam kasus Hibisc Fantasy, figur publik justru menjadi aktor utama komunikasi risiko dan mengambil peran yang sangat dominan dalam membentuk persepsi publik.

Secara teoretis, penelitian ini memperlihatkan bahwa komunikasi risiko di era media digital tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh institusi formal. Figur publik dengan kemampuan membangun visual framing dan kedekatan emosional memiliki peluang besar untuk memengaruhi persepsi risiko masyarakat secara luas. Oleh karena itu, komunikasi risiko berbasis populisme komunikatif perlu diimbangi dengan akuntabilitas kelembagaan agar tidak menimbulkan personalisasi kebijakan yang berlebihan.

Penelitian ini memperkaya kajian komunikasi risiko di Indonesia melalui integrasi teori framing, outrage management, visual framing, populisme komunikatif, dan Social Amplification of Risk Framework (SARF) dalam konteks komunikasi digital berbasis figur publik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi risiko, tetapi juga menjadi ruang pembentukan legitimasi moral, mobilisasi emosi publik, dan amplifikasi persepsi risiko sosial dalam isu lingkungan dan tata ruang.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko dalam era media digital tidak lagi berlangsung sebagai proses penyampaian informasi yang bersifat teknokratis, tetapi berkembang menjadi proses konstruksi makna yang melibatkan dimensi moral, emosional, dan simbolik. Kasus komunikasi publik yang dilakukan Dedi Mulyadi dalam pembongkaran kawasan wisata Hibisc Fantasy memperlihatkan bahwa persepsi risiko lingkungan dapat dibentuk melalui kombinasi narasi verbal dan representasi visual yang mampu menghubungkan isu kebijakan dengan pengalaman serta nilai-nilai yang dipahami masyarakat. Dengan demikian, risiko tidak hanya dikomunikasikan sebagai persoalan pelanggaran tata ruang, tetapi juga sebagai isu keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa media sosial berperan sebagai ruang strategis dalam proses amplifikasi risiko. Melalui penyajian visual yang menonjolkan kerusakan lingkungan, simbol-simbol moral, dan ekspresi emosional, komunikasi risiko memperoleh daya jangkau yang lebih luas serta mampu membangun resonansi publik terhadap isu yang disampaikan. Dalam konteks ini, efektivitas komunikasi risiko tidak hanya ditentukan oleh kualitas informasi, tetapi juga oleh kemampuan aktor komunikasi dalam mengonstruksi narasi yang relevan secara emosional dan sosial bagi khalayak.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa populisme komunikatif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membangun kedekatan antara pemimpin dan masyarakat serta meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan yang dikomunikasikan. Namun demikian, temuan ini sekaligus menunjukkan perlunya keseimbangan antara personalisasi komunikasi dan penguatan legitimasi kelembagaan agar komunikasi publik tidak bergantung secara berlebihan pada figur individu. Oleh karena itu, komunikasi risiko yang efektif memerlukan sinergi antara kepemimpinan personal yang komunikatif dan institusi publik yang akuntabel.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian komunikasi risiko dengan menunjukkan keterkaitan antara framing, outrage management, visual framing, populisme komunikatif, dan Social

Amplification of Risk Framework (SARF) dalam menjelaskan dinamika komunikasi risiko di media sosial. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembentukan persepsi risiko publik pada era digital berlangsung melalui interaksi antara konstruksi pesan, representasi visual, emosi kolektif, dan karakter komunikasi aktor yang menyampaikan pesan tersebut.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar institusi pemerintah mengembangkan strategi komunikasi risiko yang lebih adaptif terhadap karakter media digital melalui pemanfaatan visual yang informatif, narasi yang mudah dipahami, serta pendekatan komunikasi yang mampu membangun kepercayaan publik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan kajian dengan membandingkan praktik komunikasi risiko pada berbagai isu lingkungan maupun figur publik yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika komunikasi risiko digital di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, F., & Prasetyo, L. B. (2021). Conflict of land use and spatial planning policy in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012061. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012061>
- Arora, S., Koshorek, O., Keil, M., & Flemming, J. (2025). Multimodal framing analysis in news media: Combining text and visuals for a holistic perspective. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2503.20960>
- Covello, V. T., & Sandman, P. M. (2001). Risk communication: Evolution and revolution. In A. Wolbarst (Ed.), *Solutions to an Environment in Peril* (pp. 164–178). Johns Hopkins University Press.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Firman, T. (2009). The continuity and change in mega-urbanization in Indonesia: A survey of Jakarta–Bandung Region (JBR)

- development. *Habitat International*, 33(4), 327–339. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2008.08.007>
- Hidayat, N., Subekti, N., & Sulastri, D. (2021). Community-based risk communication in the COVID-19 pandemic. *JPPI: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pendidikan*, 15(2), 89–99. <https://doi.org/10.17977/um027v15i22021p089>
- Ho, R. T. H., Chan, T. S., & Kwong, C. F. (2024). Crisis and emergency risk communication: Emotional appeals, trust, and audience segmentation. *Journal of Medical Internet Research*, 26(e56854), 1–12. <https://doi.org/10.2196/56854>
- Linkov, I., Tiede, K., & Trump, B. D. (2024). Learning from the past to guide the future of research on risk communication. *Environment Systems and Decisions*, 44(1), 1–11. <https://doi.org/10.1007/s10669-024-09980>
- Lahi, B., & Suldani, M. R. Y. (2025). *Komunikasi Risiko Bencana: Mendukung Ketahanan Bencana Banjir di Kota Makassar*. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO*, Vol. 10(1), hlm. 1–18. [10.52423/jikuho.v10i1.1140](https://doi.org/10.52423/jikuho.v10i1.1140)
- Messaris, P., & Abraham, L. (2001). The role of images in framing news stories. In S. D. Reese, O. H. Gandy Jr., & A. E. Grant (Eds.), *Framing public life: Perspectives on media and our understanding of the social world* (pp. 215–226). Routledge.
- Moffitt, B. (2016). *The global rise of populism: Performance, political style, and representation*. Stanford University Press.
- Peter, E., Klinger, M., & West, P. (2024). Equity-informed risk communication via social media: Lessons from COVID-19. *BMJ Open*, 14(2), e085630. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-085630>
- Powell, T. E., Boomgaarden, H. G., de Swert, K., & de Vreese, C. H. (2015). A clearer picture: The contribution of visuals and text to framing effects. *Journal of Communication*, 65(6), 997–1017. <https://doi.org/10.1111/jcom.12184>
- Pranoto, A. (2020). Populisme komunikasi dalam kontestasi politik lokal Indonesia. *Jurnal Komunikasi Politik*, 7(2), 115–129. <https://doi.org/10.22146/jkp.2020.7.2.115-129>
- Rachmad, S. (2023). Visual symbolism in risk communication of political institutions: The KPK protest case. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i1.22947>
- Rohman, A., & Puspitasari, N. (2021). Institutional communication in disaster risk management in Indonesia. *Jurnal Komunikasi Bencana*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.25077/jkb.2021.3.1.34-46>

- Schiavo, R. (2025). *The Future of Health and Risk Communication*. *Journal of Communication in Healthcare*, 18(1), 1–5. [10.1080/17538068.2025.2469947](https://doi.org/10.1080/17538068.2025.2469947)
- Surbakti, S., & Laksana, B. (2021). Komunikasi risiko Kemenkes RI dalam penanganan COVID-19 melalui media sosial. *Sosioedukasi*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/10.31227/osf.io/9qth7>
- Triana, F. N., & Hendriyani, Y. (2022). Pengaruh persepsi risiko, pencarian informasi risiko, serta perilaku komunikasi terhadap intensi perilaku masyarakat. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26(1), 23–35. <https://doi.org/10.25077/jskm.2022.26.1.23-35>
- Vollmer, M., Smith, B., & Lee, C. (2025). Two-way communication in disaster risk management: A case study. *Frontiers in Communication*, 10, Article 1557423. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2025.1557423>
- Winugroho, H., Albab, U., & Setiawan, R. (2022). Komunikasi risiko tenaga kesehatan dalam pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 134–145. <https://doi.org/10.22146/jsp.69258>
- Yusuf, M. I., Nugraha, M., & Rahman, H. (2024). The impact of social media exposure on health risk perception (survey on Jakarta air pollution issue). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 21(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/jik.vol21.iss1>